

ABSTRAK
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH BIDANG PERIZINAN BANGUNAN DI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengalami kemajuan yang sangat signifikan baik dalam hal pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur memiliki dampak tersendiri terutama untuk tetap menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan menjamin adanya perlindungan terhadap masyarakat. Tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan luas pemukiman menimbulkan suatu permasalahan lainnya yakni adanya bangunan liar yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) untuk dijadikan tempat tinggal atau usaha oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini peranan Satpol PP sangat diperlukan untuk membantu kepala daerah agar dapat menertibkan bangunan liar yang tidak memiliki IMB. Permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana pengaturan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum Peraturan Daerah tentang izin bangunan di Kabupaten Lombok Timur dan apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Timur dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Lombok Timur.

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dengan menggunakan metode pendekatan yang meliputi persiapan materi penelitian dengan maksud mengetahui lebih mendalam permasalahan dan mengadakan tinjauan awal ke lapangan yang akan dijadikan tempat penelitian untuk mengetahui sejauh mana Peranan Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah.

Peneliti dalam tahap pengumpulan data menggunakan data primer maupun data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan. Sumber data primer ini diperoleh dari hasil observasi atau terjun langsung ke lapangan dan dari hasil wawancara terstruktur terhadap responden dengan menggunakan kuisisioner (Daftar Pertanyaan). Sedangkan data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang terkait, data ini diperoleh dari instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang berwenang untuk mempublikasikan data..

Dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah bidang perizinan di Kabupaten Lombok Timur sudah cukup tegas. Dalam hal penegakan perda terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung yaitu faktor hukum yang tegas, faktor penegakan hukum dan faktor tindak lanjut dari PPNS dan faktor penghambat yaitu kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang kurang peduli terhadap pentingnya pembuatan IMB itu sendiri.